

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA
MODAL DAN DANA BAGI HASIL MIGAS TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI ACEH**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh :

FATMAWATI
NIM 4012018036



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN
BAGI HASIL MIGAS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI ACEH**

Diajukan Oleh:

Fatmawati

Nim: 4012018036

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Perbankan Syariah

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Disetujui Oleh:

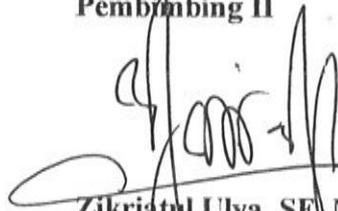
Pembimbing I



Dr. Basri, MA.

NIP: 196702141998021001

Pembimbing II

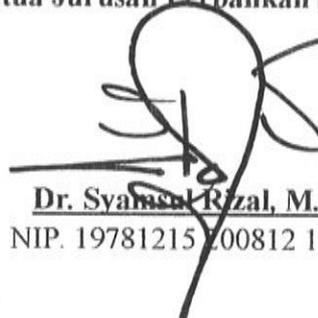


Zikriatul Ulya, SE, M.Si.

NIDN: 2024029102

Mengetahui:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Syahsah Rizal, M.Si

NIP. 19781215 200812 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Bagi Hasil Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh**". Disusun oleh Fatmawati, NIM 4012018036, Program Studi Perbankan Syariah telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 2 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 2 Februari 2023

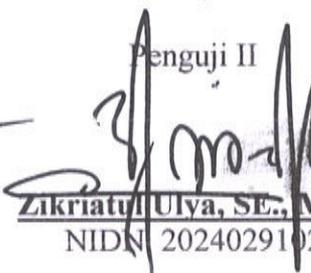
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

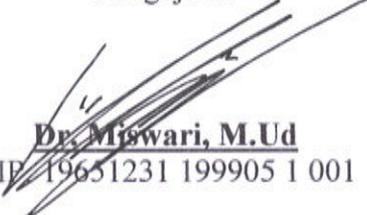
Penguji I


Dr. Abdul Hamid, MA
NIP. 19710731 200801 1 007

Penguji II


Zikriatul Ulva, SE., M.Si.
NIDN 2024029102

Penguji III


Dr. Miswari, M.Ud
NIP. 19651231 199905 1 001

Penguji IV


Fakhrizal, Lc,MA
NIP. 19850218 201801 1 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa




Prof. Dr. Iskandar, MCL
NIP. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FATMAWATI

Nim : 4012018036

Tempa/Tanggal Lahir : Bandar Baru, 07 Agustus 1999

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah (PBS)

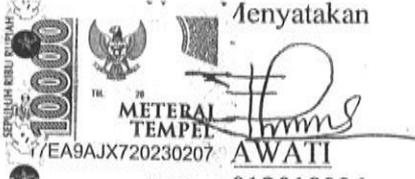
Pekerjaan : Mahasiswa/i

Alamat : Dusun. Banta Ahmad, Desa. Bandar Baru,
Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul
**“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN
DANA BAGI HASIL MIGAS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI ACEH”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan
sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya
menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 8 Agustus 2022

Menyatakan

METERAL
TEMPEL
/EA9AJX720230207
AWATI
Nim. 4012018036

MOTTO

Saya bisa menerima kegagalan, tapi saya tidak bisa terima segala hal yang tak pernah diusahakan.

“Jefri Al Buchori”

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

“QS. Albaqarah : 286”

Kesuksesan bukan kunci dari kebahagiaan, sebaliknya kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan.

“Bob Dylan”

Puji Syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, pemahaman serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya sembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta (Arsyad dan Yusmidar) yang tiada henti selalu memberikan do'a dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih untuk bapak ibu dan adik yang telah memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran yang tidak akan pernah tergantikan. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabatku dan teman-teman tercinta yang selalu memberikan motivasi dan menemani baik suka maupun duka untuk menyelesaikan skripsi ini.

terimakasih

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, Belanja Modal, Dana Bagi Hasil Migas terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dengan tahun yang diangkat yakni mulai dari tahun 2011-2020. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, serta pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yaitu dengan mendapatkan data dari dokumen-dokumen yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dan Jenderak Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: secara parsial (1) variabel PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh dengan nilai signifikansi $0,009 < 0,05$ dan nilai dari $t_{hitung} 3,778 >$ nilai $t_{tabel} 1,8945$ (2) variabel Belanja Modal memiliki tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh dengan nilai signifikansi $0,464 > 0,05$ dan nilai dari $t_{hitung} -0,783 <$ nilai $t_{tabel} 1,8945$. (3) variable Bagi hasil migas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh dengan nilai signifikansi $0,521 > 0,05$ dan nilai dari $t_{hitung} -0,682 <$ nilai $t_{tabel} 1,8945$. Hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwasanya nilai signifikansi F adalah $0,001 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 24,832 > 19,35$ menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan PAD, Belanja Modal, Bagi Hasil Migas terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Selain itu, hasil uji *R-Square* menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi secara simultan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu PAD, Belanja Modal, Bagi Hasil Migas sebesar 88,8% sedangkan sisanya 11,2% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti.

Kata Kunci : PAD, Belanja Modal, Dana Bagi Hasil Migas Dan Pertumbuhan Ekonomi di Aceh.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of PAD, Capital Expenditures, Oil and Gas Profit Sharing Funds on economic growth in Aceh, with the year appointed, starting from 2011-2020. The type used in this study uses a quantitative method with multiple linear regression analysis, as well as data collection using documentation techniques, namely by obtaining data from documents sourced from the Central Bureau of Statistics (BPS), Aceh Government Financial Statements and General Ministry of Finance. The results showed that: partially (1) the PAD variable has a positive and significant influence on economic growth in Aceh with a significance value of $0.009 < 0.05$ and the value of t_{count} is $3.778 > t_{table}$ value of 1.8945 (2) the Capital Expenditure variable has did not have a significant effect on economic growth in Aceh with a significance value of $0.464 > 0.05$ and the value of t_{count} $-0.783 < t_{table}$ value 1.8945. (3) the oil and gas revenue sharing variable has no significant effect on economic growth in Aceh with a significance value of $0.521 > 0.05$ and the value of t_{count} $-0.682 < t_{table}$ value of 1.8945. The results of the F test (simultaneous) show that the significance value of F is $0.001 < 0.05$ and the calculated F value is $24.832 > 19.35$ indicating a positive and significant effect of PAD, Capital Expenditures, Oil and Gas Revenue Sharing on economic growth in Aceh. In addition, the results of the R-Square test show that the dependent variable, namely economic growth simultaneously, can be explained by independent variables, namely PAD, Capital Expenditures, Oil and Gas Revenue Sharing by 88.8% while the remaining 11.2% is explained by other factors outside the variables studied.

Keywords: PAD, Capital Expenditures, Oil and Gas Profit Sharing Funds and Economic Growth in Aceh.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang merupakan rahmatan Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah, menuju zaman peradaban yang islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi penerang bagi perjalanan hidup umat manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat. Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Bagi Hasil Migas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh”**, tulisan ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi atas izin Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunia, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, hidayah-Nya serta bantuan dan doa dari semua pihak, maka semua kendala yang dihadapi penulis dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Prof. Iskandar Budiman, M.C.L, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

3. Bapak Dr. Syamsul Rizal, M. SI selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Muhammad Nuh Rasyid, S.Th.I, M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat serta menjadi pribadi yang berkualitas.
5. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA dan Ibu Zikriatul Ulya, S.E., M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
7. Seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memberikan informasi serta sumber referensi kepada penulis.
8. Ayah dan Mamakku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang sepenuh hati dan selalu mendo'akan tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan terkhusus Unit 2 Perbankan Syariah angkatan 2018.
10. Kepada sahabatku Khairatil Hisan, Chairunnisak dan Nanda Puspita Sari yang selalu membantu dan mendukung serta mendoakan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan dan semoga skripsi ini bermanfaat adanya, aamiin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datangnya dari penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ilmiah yang berikutnya.

Langsa, 07 Juli 2022

Penulis

FATMAWATI

DAFTAR ISI

	Hal
PERSETUJUAN	i
SURAT PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Batasan Masalah	10
1.4. Perumusan Masalah	10
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.6. Penjelasan Istilah	12
1.7. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN TEORITIS	15
2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	15
2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	15
2.2.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	15
2.2.2 Manfaat Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	21
2.2.3 Jenis-jenis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	21
2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	22

2.2.5	Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	24
2.3.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25
2.3.1	Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25
2.3.2	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	27
2.3.3	Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	29
2.4.	Belanja Modal	29
2.4.1	Pengertian Belanja Modal	29
2.4.2	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal	33
2.4.3	Indikator Belanja Modal	33
2.5.	Bagi Hasil Migas	34
2.5.1	Pengertian Bagi Hasil Migas.....	34
2.5.2	Indikator Bagi Hasil Migas	35
2.6.	Hubungan Antar Variabel	37
2.7.	Kajian Terdahulu	40
2.8.	Kerangka Teori	48
2.9.	Hipotesis	48
BAB III	METODE PENELITIAN	50
3.1.	Pendekatan Penelitian	50
3.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian	50
3.3.	Unit Analisis dan Horizon Waktu	50
3.4.	Sumber Data Penelitian	51
3.5.	Definisi Operasional	52
3.6.	Teknik Analisis Data.....	54
3.7.	Metode Analisis Data	54
3.8.	Uji Asumsi Klasik	55
3.9.	Uji Hipotesis	57
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
4.1.	Hasil Penelitian	59
4.1.1	Gambar Umum Provinsi Aceh.....	59

4.1.2	Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Aceh.....	60
4.1.3	Deskripsi Data Penelitian.....	62
4.1.4	Hasil Uji Asumsi Klasik	66
4.1.5	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	72
4.1.6	Hasil Uji T.....	73
4.1.7	Hasil Uji F.....	75
4.1.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	76
4.2.	Pembahasan	76
4.2.1	Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan ekonomi di Aceh	76
4.2.2	Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh	77
4.2.3	Pengaruh Bagi Hasil Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh	78
4.2.4	Pengaruh PAD, Belanja Modal dan Bagi Hasil Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh	79
BAB V	PENUTUP	81
5.1.	Kesimpulan	81
5.2.	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 PDRB Atas Harga Konstan Provinsi Aceh Tahun 2011-2020	3
Tabel 1.2 PAD Provinsi Aceh Tahun 2011-2020	4
Tabel 1.3 Belanja Modal Provinsi Aceh Tahun 2011-2020	6
Tabel 1.4 Dana Bagi Hasil Migas Provinsi Aceh Tahun 2011-2020	7
Tabel 2.1 Kajian Terdahulu	40
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	52
Tabel 4.1 Uji Normalitas	67
Tabel 4.2 Nilai <i>Tolerance</i> dan <i>Variance Inflation Factor</i> (VIF)	70
Tabel 4.3 Uji Autokorelasi.....	71
Tabel 4.4 Uji Regresi Linier Berganda	72
Tabel 4.5 Uji t	73
Tabel 4.6 Uji f	75
Tabel 4.7 Analisis Koefisien Determinasi	76

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 4.1 PDRB Atas Harga Konstan Provinsi Aceh Tahun 2011-2020.....	63
Gambar 4.2 PAD Provinsi Aceh Tahun 2011-2020.....	64
Gambar 4.3 Modal Provinsi Aceh Tahun 2011-2020	65
Gambar 4.4 Dana Bagi Hasil Migas Provinsi Aceh Tahun 2011-2020..	66
Gambar 4.5 Normal Probability Plot	68
Gambar 4.6 Grafik Histogram	68
Gambar 4.7 Uji Heteroskedastisitas	71

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran. 1 Data Penelitian.....	87
Lampiran. 2 Hasil Tranformasi Ln.....	87
Lampiran. 3 Hasil Uji Normalitas	88
Lampiran. 4 Hasil Uji Multikolinieritas.....	89
Lampiran. 5 Uji Autokolerasi	90
Lampiran. 6 Uji Heteroskedastisitas	90
Lampiran. 7 Hasil Uji T	90
Lampiran. 8 Hasil Uji F	91
Lampiran. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	91
Lampiran. 10 Hasil Regression	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti memampukan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang, sejak tahun 1969 dengan giat melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun.¹

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang mencerminkan aspek dinamis dari suatu perekonomian yang menggambarkan pergerakan ekonomi dari waktu ke waktu. Kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah faktor produksi, yang menunjukkan naik turunnya laju

¹ Romhadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Matematika Integratif*, 14(2), 113-120.

pertumbuhan ekonomi yang menjadi konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat berupa faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain sumber daya alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian kerja, dan skala produksi. Sedangkan faktor non ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain faktor sosial, faktor kualitatif sumber daya manusia, dan faktor politik dan administrasi.²

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjadikan tolak ukur secara makro dan dapat dicerminkan dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu daerah. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi pada daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan juga meningkat dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Sehingga pengangguran berkurang dan

² Susanti, H., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Aceh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Setelah Tsunami. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4(1), 1-12.

kemiskinan yang semakin menurun.³ Pertumbuhan ekonomi Aceh juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal serta Dana Bagi Hasil Migas ketiga faktor ini mempengaruhi perekonomian aceh.⁴

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.⁵ Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi berkembang dengan adanya perbaikan pada sektor ekonomi. Perkembangan PDRB Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Aceh Tahun 2011-2020

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)
2011	89.844.697
2012	94.290.896
2013	98.205.891
2014	102.157.046
2015	106.527.357
2016	111.067.047
2017	115.658.418
2018	120.848.599
2019	125.906.294
2020	124.975.810

Sumber: BPS Provinsi Aceh

Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa PDRB Provinsi Aceh mengalami

³ Romhadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Matematika Integratif*, 14(2), 113-120.

⁴ Hakim, L. & Wijayanti, A. (2014). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(1).

⁵ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 143

peningkatan sejak tahun 2011-2019. Rata-rata peningkatan PDRB sejak tahun 2011 hingga 2019 adalah 4 persen. Akan tetapi pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan menjadi Rp 124.975.810 juta. Hal ini disebabkan karena adanya *coronavirus disease 2019*, penggunaan APBN yang tidak efektif sehingga mempengaruhi kebijakan moneter, dan tidak ada peningkatan daya tarik ekonomi kepada para investor.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, belanja modal dan bagi hasil migas. Terkait dengan PAD, setiap daerah memiliki sumber daya tersendiri yang bisa digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. PAD merupakan penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. PAD tersebut dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan PAD Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
PAD Provinsi Aceh Tahun 2011-2020

Tahun	PAD (Ribu Rupiah)
2011	802.840.173
2012	901.720.376
2013	1.325.435.091
2014	1.731.130.839.
2015	1.972.049.032
2016	2.060.180.945
2017	2.276.305.568
2018	2.359.385.393
2019	2.698.912.471

2020	2.570.775.877
------	---------------

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, 2020

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwasannya Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun mulai dari 2011-2020. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhannya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Perspektif ini menyarankan bahwa seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak dan retribusi.⁶

Menurut Hariyanti (2007) PAD merupakan salah satu sumber pembelajaan daerah Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.⁷

Selain Pendapatan Asli Daerah, Belanja modal juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

⁶ Abrar. Muhammad .(2010). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Hal. 11

⁷ Anasmen. (2009). “Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat 2000-2006. Tesis S-2, Fakultas ekonomi Program studi perencanaan dan kebijakan publik kekhususan ekonomi keuangan negara dan daerah Depok.(tidak dipublikasi).

Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset (*Permendagri No.13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2006).

Dalam Lampiran III PMK No. 101/PMK.02/2011 Belanja Modal dipergunakan untuk antara lain: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal lainnya, dan Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU). Secara spesifik sumber pendanaan untuk Belanja Modal belum ditentukan aturannya. Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja Daerah diantaranya Belanja Modal.⁸

Tabel 1.3
Belanja Modal Provinsi Aceh Tahun 2011-2020

Tahun	Belanja Modal (Ribuan Rupiah)
2011	1.473.983.448
2012	815.338.776
2013	1.650.120.551
2014	2.407.479.412
2015	2.025.103.488
2016	2.284.582.301
2017	2.168.299.049
2018	2.503.941.129
2019	3.162.088.165
2020	1.755.472.079

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, 2020

Tabel 1.3 dapat dilihat belanja modal Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 belanja modal sebesar 1.473.983.448 tetapi pada tahun 2012 belanja modal turun menjadi 815.338.776, hal ini disebabkan karena

⁸ Erlina, & Rasdianto. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Actual*. Medan. Hal. 22

pemerintah kurang dalam memberikan tindakan dalam mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya.⁹ Kemudian mulai dari tahun 2013-2019 Belanja modal terus mengalami peningkatan hal ini menunjukkan semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah Aceh untuk melakukan pembangunan.

Selain Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal, Dana Bagi Hasil Migas juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Aceh. Dana Bagi Hasil Migas dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara rinci Alokasi Dana Bagi Hasil Migas diatur berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 Tentang dana perimbangan. Berikut data Dana Bagi Hasil Migas Aceh tahun 2011-2020:

Tabel 1.4
Dana Bagi Hasil Migas Provinsi Aceh Tahun 2010-2020

Tahun	Dana Bagi Hasil Migas (Ribu Rupiah)
2011	1.044.164.516
2012	878.780.195
2013	955.082.833
2014	1.051.034.591
2015	561.242.791
2016	300.551.470
2017	301.860.068
2018	325.183.180
2019	515.873.236
2020	406.053.141

Sumber: Jenderal Kementerian Keuangan, 2022

⁹ Fajri, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Sumatera. *E-Journal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29–35.

Tabel 1.4 di atas dapat dilihat bahwasannya data Dana Bagi Hasil Migas Aceh mulai dari tahun 2011-2020 cenderung mengalami penurunan yaitu seperti pada tahun 2011 DHB Migas sebesar 1.044.164.516 ribu rupiah kemudian mengalami penurunan selama dua tahun kedepan dan pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 1.051.034.591 ribu rupiah. Hal ini disebabkan karena dampak dari rendahnya harga minyak, dan daerah yang sering merasakan dampak dari rendahnya harga minyak yaitu Riau, Kalimantan Timur, Papua Barat dan termasuk lah Provinsi Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam).¹⁰

Kemudia mulai tahun 2015-2020 DHB Migas cenderung mengalami penurunan hal ini disebabkan karena DBH migas belum dapat diandalkan karena sangat kecil. Aceh pernah mengalami masa kejayaan produksi migas dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2000an ketika masih berproduksinya kilang gas alam cair PT. Arun. Kilang Arun mengolah gas alam yang dipasok oleh Mobil Oil waktu itu. Terakhir Mobil Oil berganti nama menjadi Exxon Mobil dan mengakhiri kontrak lapangan Arun pada tahun 2018.

Sayangnya masa kejayaan migas Aceh itu tidak dapat dinikmati oleh masyarakat Aceh karena belum ada undang-undang yang mengatur. Semua hasil bumi di daerah diambil ke pusat, selanjutnya disalurkan ke pemerintah daerah dengan jumlah yang sangat kecil. Pada saat itu Aceh menerima tidak sampai 1% setiap tahunnya jika dihitung dari migas yang dihasilkan Aceh. Aceh hanya menerima dana pembangunan dengan skema “perimbangan keuangan”. Dengan skema tersebut jelas Aceh setiap tahunnya selalu menerima jumlah yang sangat

¹⁰ Kuncoro, Mudrajat (2004). Otonomi Dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga. Hal.109

kecil, karena konsep penyaluran dana dengan skema perimbangan adalah berdasarkan jumlah penduduk.¹¹

Rahmah & Zein (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh pada tahun 2011-2014. Kemudian, pada penelitian Rokhmawati (2009) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil serupa juga ditemukan oleh Abrar (2010) yang melakukan penelitian pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan Ekonomi yang menyatakan bahwa PAD berkembang dengan tren yang positif setiap tahunnya, PDRB Provinsi Aceh juga bergerak ke arah yang positif, fungsi kuadratik keduanya harus terus perlu diwaspadai posisinya di masa depan.

Dengan melihat fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan melihat pengaruh yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal serta Dana Bagi Hasil Migas terhadap perekonomian di Provinsi Aceh selama periode tahun 2011 hingga 2020 dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Bagi Hasil Migas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh”**.

¹¹ Husna, C. A. (2013). Kontribusi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara Kaitannya Dengan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 169-196.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang didapat dari latar belakang masalah di atas, yaitu:

1. PAD Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan adanya peningkatan PAD maka pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat. Peningkatan PAD juga dapat meningkatkan investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.
2. Belanja Modal Aceh mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Ini disebabkan karena pemerintah kurang dalam memberikan tindakan dalam mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya.
3. Dana Bagi Hasil Migas Aceh mulai dari tahun 2011-2020 cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena dampak dari rendahnya harga minyak. Selain itu saat ini DBH migas belum dapat diandalkan karena sangat kecil.

1.3 Pembatasan Masalah

Berasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, penulis tidak akan membahas terlalu jauh untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam masalah ini. Permasalahan penelitian ini dibatasi oleh Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Bagi Hasil Migas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Periode Tahun 2011-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh?
3. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil migas terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Bagi Hasil Migas terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh.
2. Untuk Mengetahui bagaimana Pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh.
3. Untuk Mengetahui bagaimana Pengaruh Dana Bagi Hasil Migas terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh.
4. Untuk Mengetahui bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Bagi Hasil Migas terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Aceh hendaknya lebih memperhatikan lagi sektor pemerintahan terutama di sektor Pengeluaran serta Dana Bagi Hasil Migas, karena apabila sektor migas terus ditingkatkan maka akan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh.
2. Bagi Akademis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi dalam melakukan penelitian yang sama.

1.6 Penjelasan Istilah

Penjelasan Istilah adalah penjabaran masing-masing variabel terhadap indikator-indikator yang membentuknya.¹² Untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam menginterpretasikan pengertian masing-masing menurut konteks penelitian ini, maka penjelasan istilah dari variabel-variabel penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berbicara

¹²Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2015), hal. 23.

mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan.¹³

2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset (*Permendagri No.13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2006). Dalam Lampiran III PMK No. 101/PMK.02/2011 Belanja Modal dipergunakan untuk antara lain: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal lainnya, dan Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU). Secara spesifik sumber pendanaan untuk Belanja Modal belum ditentukan aturannya. Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja Daerah diantaranya Belanja Modal.¹⁴
3. DBH migas adalah dana yang berasal dari penerimaan negara yang bersumber dari sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota maupun wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.¹⁵
4. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai

¹³ Halim, Abdul, (2004). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Revisi). Jakarta; Salemba Empat. Hal. 42

¹⁴ Erlina, & Rasdianto. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Actual*. Medan. Hal. 22

¹⁵ (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008).

kinerja suatu perekonomian khususnya untuk menganalisis hasil pembangunan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan ekonomi di suatu daerah.¹⁶

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan menguraikan tentang latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini yaitu teori tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Bagi Hasil Migas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang waktu dan tempat penelitian, Jenis Penelitian, Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Variabel Penelitian, Definisi Operasional Variabel, Teknik Analisis Data, Analisis Regresi Berganda.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Membahas hasil dari penelitian yang berisi tentang gambaran objek penelitian dan hasil analisis dari pengolahan data, yaitu analisis data secara deskriptif.

¹⁶ Sukirno Sadono, *Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2012) hal 423.

BAB V: PENUTUP

Membahas tentang kesimpulan dan sasaran dari analisa data penelitian.

Bab kelima adalah bab penutup, yang berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian dari temuan yang di dapat dalam penelitian hingga diharapkan dapat memberikan manfaat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya.¹⁷ menurut Untoro, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang.¹⁸

Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideology terhadap berbagai keadaan yang ada.¹⁹

Sedangkan menurut Ali Ibrahim Hasyim, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ada

¹⁷ Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.10

¹⁸ Joko Untoro, *Ekonomi makro*, (Jakarta : Kawah Media,2010), h39

¹⁹ Michel Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*, (Jakarta, Erlangga, 2000), h.44

tiga komponen dasar yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa : (1) Meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; (2) teknologi maju sebagai faktor utama yang menentukan drajat pertumbuhan dalam menyediakan aneka ragam barang kepada penduduknya; (3) penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian dibidang kelembagaan dan edeologi, sehingga inovasi yang dihasilkan oleh IPTEK uat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.²⁰

Sedangkan menurut Lincolin Arsyad, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *gross domestic product (GDP) / gross national product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.²¹ Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu *mencapai pertumbuhan (growth), pemerataan (equity) dan keberlanjutan (sustainnability)*.²²

1. Pertumbuhan (*growth*), tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya alam dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif.
2. Pemerataan (*equity*), dalam hal ini mempunyai implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga,sumber daya dapat berkelanjutan

²⁰ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 231

²¹ Arsyad Loncolin, *Ekonomi Pembangunan Edisi keempat*, (Yogyakarta: STIE, YKPN, 1999), h.13

²² Arsyad Loncolin, *Ekonomi Pembangunan*, (STIE, YKPN, Yogyakarta, 2011), hlm.12

maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan.

3. Berkelanjutan (*sustainability*), pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditrasaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi. pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah-daerah, benar-benar dengan potensi dan prioritas daerah. untuk keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku karangannya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nations*, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah perkembangan ekonomi.²³

1. Teori Inovasi Schumpeter

Pada teori ini menekankan pada faktor inovasi entrepreneur sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kapitalistik, dinamika persaingan akan mendorong hal ini.

²³ Michel Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga* (Jakarta : Erlangga, 2000), h. 44

2. Model Pertumbuhan Harrot-Domar

Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural. Selain kuantitas faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan pelatihan. Model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan atau investasi yang diperlukan untuk memelihara tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah kapital-output.

3. Model Input-Output Leontief

Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antar industri. Dengan menggunakan tabel ini maka perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran hubungan aliran input-output antar industri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dan dalam jangka pendek/menengah dianggap konstan tak berubah.

4. Model Pertumbuhan Lewis

Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negara sedang berkembang banyak (padat) penduduknya. Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk disektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan.

2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.2.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit

usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.²⁴

Pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengolah sumber daya alam yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan perkembangan kegiatan ekonomi (Pertumbuhan ekonomi) di suatu wilayah. Pada hakekatnya inti dari teori pertumbuhan dan pembangunan daerah berkaitan pada dua hal yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ada beberapa teori untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu daerah, pertama teori basis ekonomi, teori ini menyatakan bahwa factor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan suatu barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi dari industry di suatu daerah yang menggunakan sumber daya produksi local termasuk tenaga kerja dan bahan baku dan outputnya di ekspor dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita melalui penciptaan

²⁴ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 142

peluang kerja di daerah tersebut. Kedua adalah teori kawasan, teori ini sering digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan yang dianggap paling tepat disuatu daerah. Ketiga yaitu teori daya Tarik industry, dalam upaya pembangunan ekonomi daerah di Indonesia sering dipertanyakan jenis-jenis industri apa saja yang tepat untuk dikembangkan di suatu daerah.

Pembangunan daerah dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Jika sarana dan prasarana yang dimiliki daerah memadai maka masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-harinya dengan nyaman dan aman yang akan berpengaruh pada meningkatnya produktivitas yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut, dengan bertambahnya belanja pembangunan maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pembangunan daerah dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan menggunakan pendapatan per kapita atau produk domestik regional bruto (PDRB). Produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah.²⁵

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun²⁶, sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan

²⁵ *Ibid*, h. 143

²⁶ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 144

peranan sektor ekonomi. Untuk lebih jelas dalam menghitung angka-angka Produk Domestik Regional Bruto ada tiga pendekatan yang sering digunakan dalam melakukan suatu penelitian.

2.2.2 Manfaat Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Adapun manfaat penghitungan nilai PDRB yaitu:²⁷

1. Untuk bahan evaluasi pembangunan di masa lalu secara keseluruhan.
2. Untuk bahan umpan balik terhadap perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Untuk dasar pembuatan proyeksi perkembangan perekonomian di masa yang akan datang.
4. Untuk memantau inflasi berdasarkan perubahan harga.

Untuk membandingkan peranan masing-masing sektor di wilayah.

2.2.3 Jenis-jenis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut BPS, salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahunnya ialah data PDRB. Jenis-jenis PDRB antara lain:²⁸

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar akan menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, ini berlaku sebaliknya.

²⁷ *Ibid*

²⁸ <https://aceh.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 21 November 2021

2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Dalam distribusi PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha sendiri memiliki peran besar dalam menunjukkan basis ekonomi suatu daerah
4. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
5. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan yang nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Terdapat beberapa faktor produksi yang mempengaruhi PDRB, antara lain sebagai berikut:²⁹

1. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan

²⁹ Budiarmo, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: BPFE, 2015), h. 114

sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan membangun dengan cepat.

2. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktifitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko dalam ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Menurut Schumpeter, seorang wiraswasrawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

3. Akumulasi Modal

Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat di reproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalm bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja. Pembentukan

modal ini pula yang membawa kearah kemajuan teknologi yang pada akhirnya membawa kearah penghematan dalam produksi skala luas dan juga membawa kearah penggalian sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuab ekonomi.

4. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktifitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi. e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa perekonomian kerah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh.

2.2.5 Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut BPS, salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahunnya ialah data PDRB.

Dari data PDRB ini berguna untuk: ³⁰

1. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.

³⁰ <https://aceh.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 31 Desember 2021

2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor.
3. Dalam distribusi PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha sendiri memiliki peran besar dalam menunjukkan basis ekonomi suatu daerah.
4. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
5. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan yang nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmad Yani merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³¹ Menurut Abdul Halim pendapatan Asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain.³²

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pasal 157 huruf a Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan

³¹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 51

³² Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 10

bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, komponen tersebut berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Menurut Warsito didalam buku Wulandari dan Iryanie, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sedangkan menurut Herlina Rahman, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.³³ Dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berdasarkan dari potensi daerah.

³³ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: CV, Budi Utama, 2018), h. 24

Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan asli daerah tersebut secara optimal.

2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang No.32 tahun 2004 pasal 157 tentang pemerintahan daerah, yaitu:³⁴

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2009).
 - b. Hasil Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (pasal 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2009).
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang

³⁴ Ahmas Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h 6

disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa dan memperkembangkan perekonomian daerah. Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti perusahaan daerah air minum (PDAM), bank pembangunan daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesangahan dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan anatar lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotan, pertambangan sumber daya alam serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa Giro
 - c. Pendapatan Bunga

- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.3.3 Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Aries Djaenuri kelompok pendapatan asli daerah terdiri atas :³⁵

1. Hasil pajak daerah;
2. hasil retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.4 Belanja Modal

2.4.1 Pengertian Belanja Modal

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merta melalui belanja negara baik itu belanja rutin maupun belanja pembangunan. Menurut Sukirno, pengeluaran (perbelanjaan) pemerintah adalah perbelanjaan pemerintah terhadap barang-barang modal, barang konsumsi dan jasa-jasa.³⁶ Sedangkan Amri pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya

³⁵ Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h.88

³⁶ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Prasad, 2011), h. 61

ekonomi yang secara dikuasi dan dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak.³⁷

Menurut Mangkoesoebroto, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.³⁸ Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan dalam dua golongan sebagai berikut.³⁹

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari belanja pegawai yaitu untuk pembayaran gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan, belanja barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga hutang negara, belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik dan belanja perjalanan yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan

2. Pengeluaran Pembangunan Fisik

³⁷ Amir Amri, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 69

³⁸ Ajuar, *Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan, Vol.20, no.2 Agustus 2016, h. 152

³⁹ Amir Amri, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 69

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Mankiw menjelaskan pengeluaran pemerintah yang didistribusikan dengan daya beli ditengah masyarakat disebut dengan pembayaran transfer pemerintah. Pembayaran transfer ini membuat sumber-sumber pendapatan menyokong pada penerimaan yang tidak mampu menyediakan pelayanan sebagai imbalan dari pendapatan yang diterima kemudian. Defisit anggaran dapat mempengaruhi alokasi sumber daya (dengan mempengaruhi pengeluaran-pengeluaran pemerintah) dan seluruh ukuran sektor pemerintah dalam perekonomian. Defisit juga dapat mempengaruhi harga dan tingkat bunga dengan demikian mempengaruhi distribusi pendapatan.⁴⁰ Terdapat tiga fungsi utama keuangan pemerintah, sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ Gregory N Mankiw, *Makroekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.152

⁴¹ *Ibid*, h.155

1. Fungsi alokasi adalah merupakan proses dimana sumber daya (resources) nasional yang digunakan untuk barang privat dan barang publik seperti diketahui masyarakat membutuhkan baik barang privat maupun barang publik.
2. Fungsi distribusi, pada hakikatnya merupakan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan dan merupakan anggaran yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi masalah kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat.
3. Fungsi stabilitasi, penggunaan kebijaksanaan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga dan laju pertumbuhan ekonomi, yang memadai dengan memperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 91/PMK.06/2007 tentang bagan akun standar (BAS) mendefinisikan belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap dan aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Sesuai dengan Peemendagri nomor 13 tahun 2006 bahwa Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung yang juga merupakan bagian dari belanja

daerah dan didanai oleh pendapatan daerah, maka besar kecilnya alokasi untuk Belanja Modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah (PAD), samping itu pemerintah pusat juga akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum pemerintah daerah. Kontribusi pendapatan asli daerah dalam pengalokasian anggaran cukup besar, begitu pula dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat.⁴²

2.4.3 Indikator Belanja Modal

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal (PERDIRJEN) perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :⁴³

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

⁴² Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

⁴³ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hal. 86.

2.5 Bagi Hasil Migas

2.5.1 Pengertian Bagi hasil Migas

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil untuk melihat angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan desentralisasi dari pusat kepada daerah.⁴⁴ Menurut Nordiawan, bahwasannya DBH merupakan pajak dan sumber daya alam pajak sendiri terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak penghasilan (Pph), maka baik dari WP orang pribadi dalam negeri ataupun dari Pph 21.⁴⁵

DAK ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termaksud dalam komponen belanja modal dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik.⁴⁶

Dalam pasal 181 ayat (1) huruf b angka 5 dan 6 undang-undang nomor 11 tahun 2006 Tentang pemerintah aceh yang mengatur kekhususan aceh dari

⁴⁴ Listiotini, “*Fenomen Flaypaper Effect Pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten / kota di Sumatera Utara*”, Jurnal Keuangan dan Bisnis, Vol.4 No, 2012

⁴⁵ Dedi Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h.56

⁴⁶ *Ibid*, h.59

berbagai sektor, yang mana salah satu sector yang paling menjadi harapan masyarakat aceh adalah sector migas mengatur pembagian hasil migas aceh sebagai berikut :1) dari pertambangan minyak bumi aceh mendapat 15 % dan 2) dari pertambangan gas bumi aceh terdapat 30 %. Kedua jenis perolehan tersebut dikelompokkan kedalam dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi (DBH SDA Migas). Makin besar produksi yang dihasilkan, tentu makin besar pula penerimaan yang diperoleh aceh.⁴⁷

2.5.2 Indikator Dana Bagi Hasil Migas

Dalam pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 dijelaskan:⁴⁸

1. TDBH Migas diarahkan untuk program dan kegiatan dengan alokasi:
 - a. Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari TDBH Migas dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Aceh; dan
 - b. Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari TDBH Migas dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan yang strategis, mempunyai daya dorong yang kuat dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik, nyata dan adil yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota.

⁴⁷ Pasal 181 ayat 1 huruf b angka 5 dan 6 undang-undang nomor 11 tahun 2006

⁴⁸ Pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019

2. Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan yang strategis, yang dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. Sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan di Aceh;
 - b. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dialokasikan untuk pemerintah Kabupaten/Kota penghasil; dan
 - c. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dialokasikan untuk pemerintah kabupaten/kota non penghasil dengan rincian:
 - 1) Sebesar 50% (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar; dan
 - 2) Sebesar 50% (lima puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan dengan beberapa indikator seperti:
 - a) Jumlah penduduk; dan
 - b) Luas wilayah
3. Alokasi Pagu Indikatif TDBH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur pada bulan Februari.

2.6 Hubungan Antara Variabel

1. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan utama dari desentralisasi Fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber

keuangan local, khususnya melalui pendapatan asli daerah.⁴⁹ Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan perkapita yang lebih baik. PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah.⁵⁰

PAD merupakan sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu. Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah. Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD bila yang terjadi sebaliknya, maka bias diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

2. Hubungan antara Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

⁴⁹ Brata, Aloysius Gunadi, *Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. (Yogyakarta, Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya, 2004), h.21

⁵⁰ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010), h.254

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pelayanan sektor public secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana public, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan meningkatkan PDB atau PDBR. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas.⁵¹ Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Jika PEMDA menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.⁵² Pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi alokasi belanja modal untuk perkembangan infrastruktur menunjang perekonomian akan mendorong tingkat produktivitas penduduk. Pada gilirannya

⁵¹ Saragih Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan pertama, (Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), h.47

⁵² Adi, Prio Hari, Dampak Desentralisasi terhadap Perumbuhan Ekonomi Study pada Kabupaten dan Kota Sejawab Bali (Salatiga, Jurnal Kritis Universitas Kristen Satya Wacana, 2005), H. 8

hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan perkapita.⁵³

3. Hubungan Migas dan Pertumbuhan Ekonomi

DBH migas merupakan dana yang berasal dari penerimaan anggaran yang menjadi bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dasar dari penerimaan DBH migas tersebut adalah dari pertambangan minyak dan gas yang telah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dari daerah penghasil dana DBH migas yang menjadi bagian dari APBD tersebut secara tidak langsung dapat dimanfaatkan untuk keperluan daerah seperti untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, dan lain-lain.

2.7 Kajian Terdahulu

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Rahman AR/2016	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap	X1 = PAD, X2 = DAU, X3 = DBH, Y=Pertumbuhan Ekonomi	Analisis Regresi Linier Berganda	PAD memiliki pengaruh searah dengan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan nya, semakin	Persamaan penelitian ini yaitu mengkaji variabel PAD dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaannya

⁵³ Sidik, machfud, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah*, dalam Orasi Ilmiah disampaikan pada Acara Wisuda XX1 STAIN LAN, Bandung, 10 April 2002, H.12

	Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh ⁵⁴			tinggi dana PAD yang direalisasikan maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi umum memiliki pengaruh searah dengan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya, semakin tinggi dana alokasi umum yang direalisasikan maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Dana bagi hasil memiliki pengaruh searah dengan pertumbuhan ekonomi.	yaitu pada penelitian Rahman AR tidak mengkaji bagi hasil migas.
Abel Rinaldi/2016	Pengaruh Pendapatan Asli	X1 = PAD X2 = Dana Perimbangan	Analisis Regresi Linier	Hasil penelitian ini yaitu	Persamaan penelitian ini yaitu

⁵⁴ Rahman AR, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol 1, No 1, 2016

	Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan ⁵⁵	n Y = Belanja Modal	Berganda	menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara persial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Dana Perimbangan Berpengaruh terhadap Belanja Modal.	mengkaji variabel PAD dan belanja modal. Perbedaannya yaitu pada variabel dependen yang diteliti adalah belanja modal, bukan pertumbuhan ekonomi
Yunita Kumala Sari/2015	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tenaga Kerja	X1 = PAD, X2 = Belanja Modal, X3 = Dana Perimbangan, X4 = Tenaga Kerja	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan tenaga kerja	Persamaan penelitian ini yaitu mengkaji PAD, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaannya

⁵⁵ Abel Rinaldi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016

	terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009- 2013) ⁵⁶	Y=Pertumbuhan Ekonomi		berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel belanja modal dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	yaitu tidak mengkaji bagi hasil migas.
Mawarni/2013	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada	X1 = PAD X2 = DAU Y1 = Belanja Modal Y2 = Pertumbuhan Ekonomi	Analisis Path	Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja	Persamaan penelitian ini yaitu mengkaji PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Mawarni menggunakan analisis path.

⁵⁶ Yunita Kumala Sari, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013)", *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015

	Kabupaten dan Kota di Aceh)			modal dan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.	
Surtika Yanti, dkk 2021	Pengaruh Belanja Modal, Investasi PMDN Dan Investasi PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Di Provinsi NTB ⁵⁷	X1 = Belanja Modal X2 = Investasi PMDN X3= Investasi PMA Y= Pertumbuhan Ekonomi	Analisis Data Panel	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah dan investasi asing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan PMDN berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji variabel Belanja Modal dan PDRB, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini tidak terdapat variabel Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Migas.

⁵⁷ Surtika Yanti, Pengaruh Belanja Modal, Investasi PMDN Dan Investasi PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB, *Jurnal Ekonobis*, Vol 7, No 1, 2021

				kota provinsi NTB	
Ni Wayan Nuryanti Dewi, dkk/ 2015	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Langsung di Provinsi Bali ⁵⁸	X1 = PAD, X2 = DBH, Y1 = Belanja Langsung, Y2 = Pertumbuhan Ekonomi	Analysis Path dan Uji Sobel	PAD berpengaruh langsung terhadap belanja langsung, dan dana bagi hasil tidak berpengaruh langsung terhadap belanja langsung. Dana bagi hasil dan belanja langsung berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan PAD tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.	Persamaan penelitian ini yaitu mengkaji variabel PAD dan pertumbuhan ekonomu. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini mengkaji variabel belanja langsung dan tidak mengkaji variabel belanja modal dan dana bagi hasil migas.
Romi Daniel Towu, Debby Christina Rotinsulu, George M. V Kawung	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja	X1 = PAD X2 = Belanja Modal Y= Pertumbuhan	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji variabel

⁵⁸ Ni Wayan Nuryanti Dewi, dkk, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Langsung di Provinsi Bali", Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 4, No. 11 November 2015

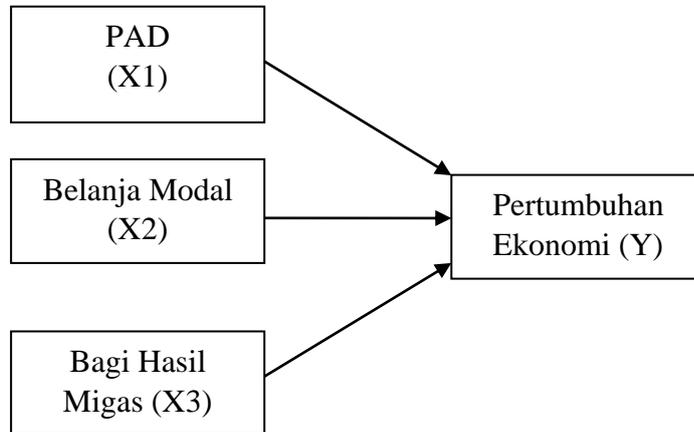
	Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa ⁵⁹	n Ekonomi		Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara bersama-sama atau simultan maka pendapatan asli daerah dan belanja modal memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	PAD, Belanja Modal, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaannya yaitu tidak mengkaji bagi hasil migas
Siti Mundiroh 2019	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi	X1 = Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan	Persamaan penelitian ini yaitu variabel

⁵⁹ Romi Daniel Tuwo, Debby Christina Rotinsulu, George M.V Kawung, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 21, No.04 Oktober 2021

	Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah ⁶⁰	X2 = PAD X3 = DAU X4 = DBH Y = Belanja Modal Daerah		petumbuhan ekonomi daerah dan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal variabel PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	bebas mengkaji Pendapatan Asli Daerah, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini variabel bebas yang dikaji Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH).Serta tidak mengkaji variabel Bagi Hasil Migas,
--	--	--	--	---	--

⁶⁰ Siti Mundiroh , “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, , Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah”, Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, Vol 2 , No 1,2019

2.8 Kerangka Teori



2.9 Hipotesis

H_{a1}: PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.

H_{o1}: PAD tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.

H_{a2}: Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.

H_{o2}: Belanja modal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.

H_{a3}: Bagi hasil migas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.

H_{o3}: Bagi hasil migas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.

H_{a4}: PAD, belanja modal dan bagi hasil migas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.

H_{o4}: PAD, belanja modal dan bagi hasil migas secara simultan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan meneliti seberapa besar pengaruh variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependen*). Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁶¹

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam hal ini penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh. Untuk pengolahan data dibutuhkan data yang akurat maka dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, Jenderal Kementerian Keuangan dan waktu yang digunakan adalah 10 tahun terakhir yaitu 2011-2020, dengan tujuan untuk menguatkan data dari penelitian sebelumnya.

3.3 Unit Analisis dan Horizon Waktu

3.3.1 Unit Analisis

Unit Analisis dapat berupa individual, pasangan, kelompok, organisasi dan kebudayaan. Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Penelitian ini melihat Pengaruh

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 212

Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Bagi Hasil Migas terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

3.3.2 Horizon Waktu

Horizon waktu terbagi menjadi dua yaitu studi *cross-sectional* dan studi *longitudinal*. Sebuah studi yang dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian disebut studi *one-shot* atau *cross-sectional*. Sebuah studi yang data variabel terikatnya dikumpulkan pada dua atau lebih batas waktu untuk menjawab pertanyaan disebut *longitudinal*. Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini studi *one-shot* atau *cross-sectional*. Karena dalam penelitian ini data yang dikumpulkan hanya sekali yaitu data Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Bagi Hasil Migas terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2020 maka horizon waktunya *one-shot* atau *cross sectional*.

3.4 Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka atau bilangan baik utuh maupun tidak utuh.⁶² Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data mengenai data Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Bagi Hasil Migas terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2020.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh periset

⁶² *Ibid.*, h. 29

sendiri. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, Jenderal Kementerian Keuangan.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel terdiri dari variabel-variabel yang akan di uji peneliti yaitu:

1. Variabel bebas (variabel independen) adalah variabel yang mempengaruhi perubahan pada variabel terikat, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Modal (X2) dan Bagi Hasil Migas (X3).
2. Variabel terikat (variabel dependen) adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya perubahan dari variabel bebas, yaitu variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Skala Pengukuran
PDRB (Y)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu	Rupiah

	daerah.	
Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	Semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.	Rupiah
Belanja Modal (X ₂)	Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.	Rupiah
Bagi Hasil Migas (X ₃)	Dana Bagi Hasil migas	

	merupakan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah dengan porsi yang telah ditetapkan.	Rupiah
--	---	--------

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis deskriptif kuantitatif merupakan metode yang dilakukan dengan pengumpulan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan software SPSS Versi 23.00.

3.7 Metode Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel berikutnya.

Rumus analisis regresi linier berganda yaitu:⁶³

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan ekonomi

X₁ = Pendapatan Asli Daerah

X₂ = Belanja Modal

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.64

X_3 = Bagi Hasil Migas

a = Konstanta

b_1 = Koefisien Regresi Variabel Pendapatan Asli Daerah

b_2 = Koefisien Regresi Variabel Belanja Modal

b_3 = Koefisien Regresi Variabel Bagi Hasil Migas

e = Error

3.8 Uji Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui normalitas masing-masing variabel.⁶⁴ Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov Smirnov (K-S) yang dilakukan dengan membuat hipotesis nol (H_0) untuk data berdistribusi normal dan hipotesis alternatif (H_a) untuk data tidak berdistribusi normal. Data dikatakan memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal jika nilai signifikansi dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05.

3.8.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi yang dilakukan ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen.⁶⁵

⁶⁴ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), h. 75

⁶⁵ *Ibid*, h. 170

Uji multikolinieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai tolerance. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance $< 0,1$ atau sama dengan VIF > 10 . Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.⁶⁶

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama/berbeda disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika *scatterplot* titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan titik mempunyai pola yang teratur. Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang.⁶⁷

3.8.4 Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut tidak layak dipakai prediksi. Ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁶ *Ibid*, h. 171

⁶⁷ *Ibid*, h. 173

⁶⁸ *Ibid*, h. 77

1. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW di bawah -2 ($DW < -2$).
2. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada di antara -2 dan + 2 atau $-2 \leq DW \leq + 2$.
3. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2 atau $DW > +2$.

3.9 Uji Hipotesis

3.9.1 Uji T

Uji T digunakan untuk menguji apakah secara individu variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.⁶⁹ Hipotesisnya yaitu:

1. $H_0 : \beta_i = 0$, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Bagi Hasil Migas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

$H_a : \beta_i \neq 0$, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Bagi Hasil Migas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

2. Level signifikansi yaitu : 5%
3. Kriteria pengujian :

Jika nilai $t_{sig.} > \alpha = 0,05$, maka hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak.

Jika nilai $t_{sig.} < \alpha = 0,05$, maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $t_{sig.} < \alpha = 0,05$, maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima.

⁶⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS*, (Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 135

3.9.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara serentak variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.⁷⁰ Hipotesisnya yaitu:

1. $H_0 : \beta_i = 0$, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Bagi Hasil Migas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_a : \beta_i \neq 0$, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Bagi Hasil Migas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Level signifikansi yaitu : 5%.

3. Kriteria pengujian :

Jika nilai $F_{sig.} > \alpha = 0,05$, maka hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika nilai $F_{sig.} < \alpha = 0,05$, maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima

3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam analisis ini terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien determinasi atau yang sering disebut dengan koefisien penentu, karena besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi (R^2), sehingga koefisien ini berguna untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

⁷⁰ *Ibid*, h. 136

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Aceh

Provinsi Aceh terletak di ujung Barat Laut Sumatera (2°00'00"-6°04'30" Lintang Utara dan 94°58'34"-98°15'03" Bujur Timur) dengan Ibukota Banda Aceh, memiliki luas wilayah 56.758,85 km² atau 5.675.850 Ha (12,26 persen dari luas pulau Sumatera), wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.479.802 Ha dengan garis pantai 2.666,27 km². Secara administratif pada tahun 2009, Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 276 kecamatan, 755 mukim dan 6.423 gampong atau desa.⁷¹

Provinsi Aceh memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan Nasional dan Internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat dengan batas wilayahnya : sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Teluk Benggala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.⁷²

Perkembangan perekonomian Nanggroe Aceh Darussalam ditunjang oleh 3 kawasan industri yaitu Truman, Pasir Raja dan Labuhan Haji yang berada di Kabupaten Aceh Selatan. Prasarana jalan darat Provinsi ini sepanjang 15.458,48 km yang terdiri dari jalan negara sepanjang 1.782,78 km dan jalan Provinsi

⁷¹ BPS Kota Langsa, 2021, diakses pada tanggal 13 Januari 2022

⁷² *Ibid*

sepanjang 1.701,82 km. Untuk transportasi laut, terdapat 6 (enam) pelabuhan laut utama yaitu Sabang, Meulaboh, Lhokseumawe, Kuala Langsa, dan Malahayati yang sekaligus sebagai pelabuhan penyeberangan, pelabuhan penyeberangan yang lain adalah Pelabuhan Balohan. Provinsi ini juga memiliki Bandar udara yaitu Bandar Udara Sultan Iskandar Muda yang terletak di Kota Banda Aceh. Beberapa prasarana penyeberangan di Provinsi Aceh pernah pernah hancur oleh bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami tahun 2004, sebagian telah diperbaiki dan pada saat ini telah berfungsi dengan baik.

Hampir seluruh pelabuhan laut tersebut belum berfungsi secara optimal. Ini terkait dengan kelengkapan sarana dan prasarana. Beberapa pelabuhan yang telah memiliki fasilitas *crain* adalah pelabuhan Malahayati, pelabuhan Krueng Geukuh dan pelabuhan Sabang untuk mendukung kegiatan ekspor-impor. Namun kegiatan ekspor-impor ini tidak didukung oleh ketersediaan komoditas ekspor dengan skala ekonomi yang memadai sehingga terjadi trade imbalance di provinsi ini. Provinsi Aceh mempunyai beragam kekayaan sumberdaya alam antara lain minyak dan gas bumi, pertanian, industri, perkebunan, perikanan darat dan laut, pertambangan umum yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.⁷³

4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Aceh

Visi:

Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani

⁷³ <https://acehprov.go.id> , diakses pada tanggal 07 Juli 2022

Misi:

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalismedan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;
5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
7. Menyediakan sumber energy yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;

8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.⁷⁴

4.1.3 Deskripsi Data Penelitian

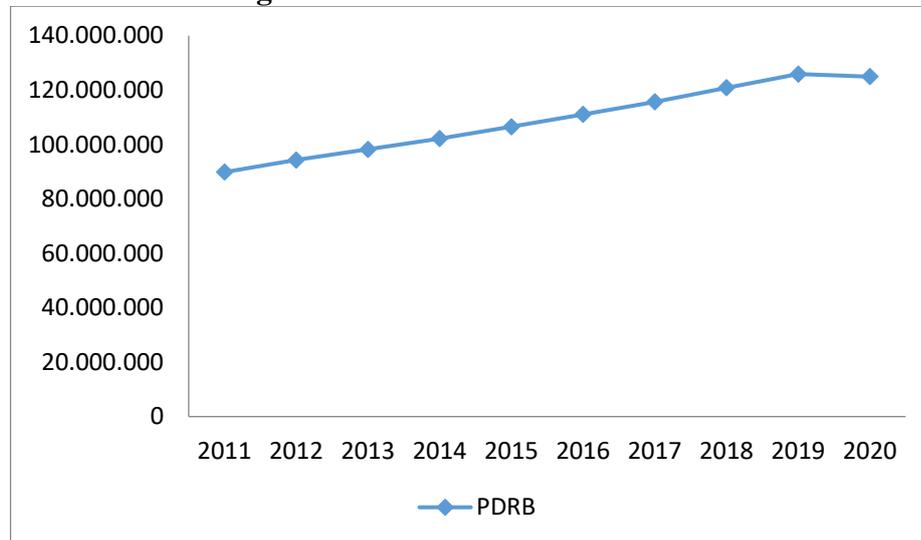
4.1.3.1 Perkembangan PDRB Provinsi Aceh

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah itu sendiri. Dalam rangka evaluasi dan proses penyusunan perencanaan dibutuhkan berbagai indikator-indikator yang dapat menggambarkan potensi dan kemajuan pembangunan daerah.

Perkembangan PDRB Provinsi Aceh dapat dilihat pada grafik berikut.

⁷⁴ <https://acehprov.go.id> , diakses pada tanggal 07 Juli 2022

Grafik 4.1
Perkembangan PDRB Provinsi Aceh Tahun 2011-2020



Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa PDRB Provinsi Aceh mengalami peningkatan sejak tahun 2011-2019. Akan tetapi pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan menjadi Rp 124.975.810. Hal ini disebabkan karena adanya *coronavirus disease 2019*, penggunaan APBN yang tidak efektif sehingga mempengaruhi kebijakan moneter, dan tidak ada peningkatan daya tarik ekonomi kepada para investor.

Dari tabel di atas juga dapat dijelaskan bahwa PDRB tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 125.906.294 juta, sedangkan PDRB terendah yaitu pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 89.844.697 juta.

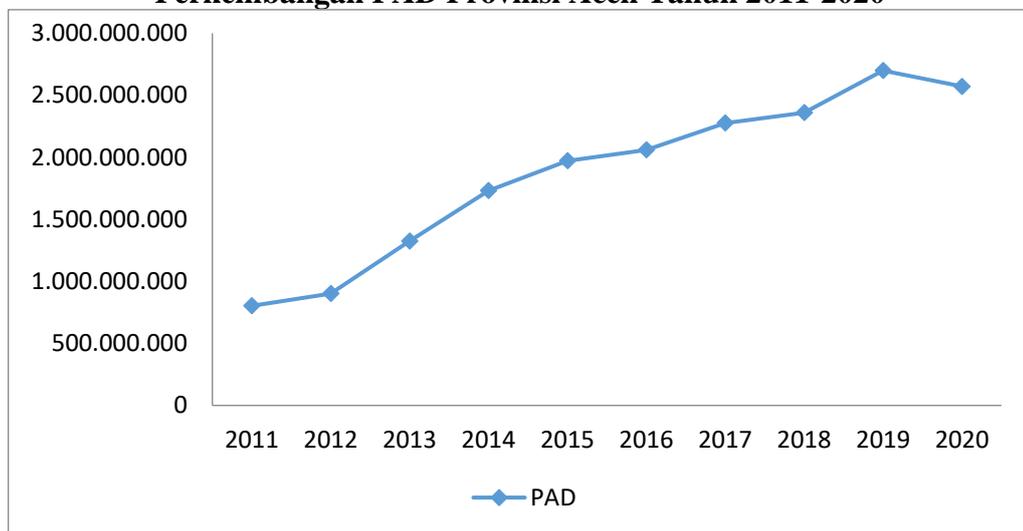
4.1.3.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan PAD yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah pasal 3 yaitu memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Jadi, semakin tinggi penerimaan PAD yang diperoleh oleh daerah maka akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi karena PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang penting bagi daerah.

Perkembangan PAD Provinsi Aceh dapat dilihat pada grafik 4.2 berikut.

Grafik 4.2
Perkembangan PAD Provinsi Aceh Tahun 2011-2020

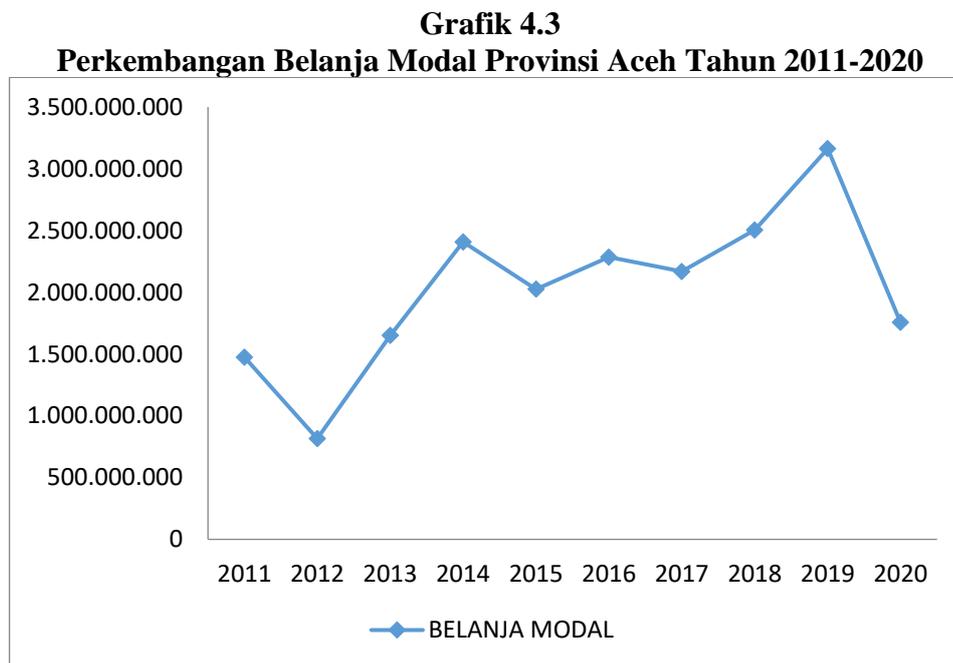


Dari Grafik 4.2 dapat dijelaskan pada tahun 2012 PAD mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2019 PAD merupakan peningkatan tertinggi selama 10 tahun terakhir sebesar 2.698.912.471. Hal ini dikarenakan efektifnya pemungutan PAD baik dari retribusi maupun pajak daerah di Provinsi Aceh. Hingga pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2.570.775.877.

4.1.3.3 Perkembangan Belanja Modal Provinsi Aceh

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Adapun perkembangan belanja modal Provinsi Aceh dapat dilihat pada Grafik 4.3 berikut.



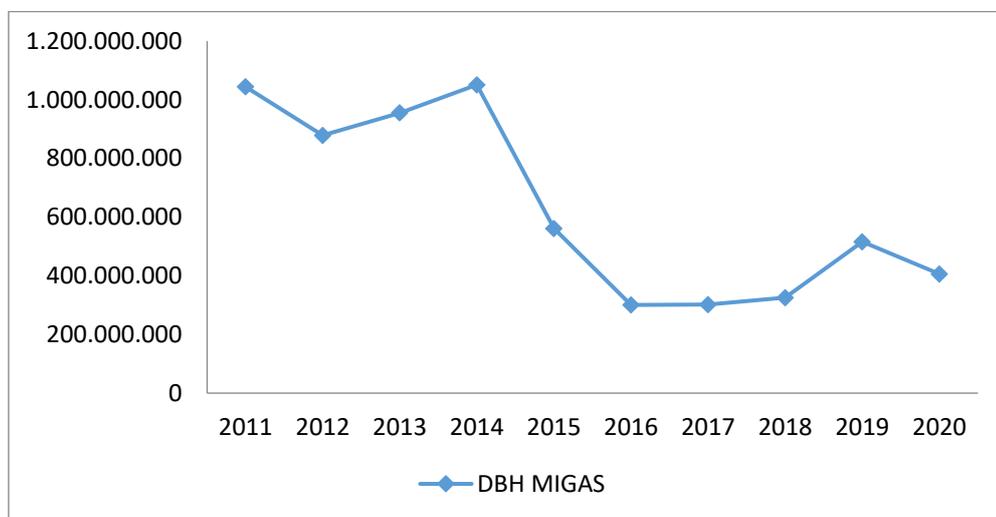
Dari tabel di atas dapat dilihat terus mengalami Fluktuasi sejak tahun 2011 hingga 2020. Total belanja modal tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 3.162.088.165, sedangkan belanja modal terendah yaitu pada tahun 2012 sebesar

Rp 815.338.776. Besarnya nilai belanja modal didasarkan pada penggunaan terhadap aset dan pembangunan daerah di tahun tersebut.

4.1.3.4 Perkembangan Dana Bagi Hasil Migas Provinsi Aceh

Perkembangan DBH migas Aceh dapat dilihat pada Grafik 4.4 berikut.

Grafik 4.4
Perkembangan DBH Migas Provinsi Aceh Tahun 2011-2020



Dari Grafik 4.4 dapat dilihat dana bagi hasil migas Provinsi Aceh sejak tahun 2011-2020. Pada tahun 2014 merupakan DBH migas tertinggi dan tahun 2016 BDH terendah dari tahun 2011 sampai 2020. Penurunan dana bagi hasil migas disebabkan karena belum ditemukannya cadangan baru untuk eksplorasi migas di Aceh.

4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03249809
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.193
	Positive	.193
	Negative	-.171
Test Statistic		.193
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

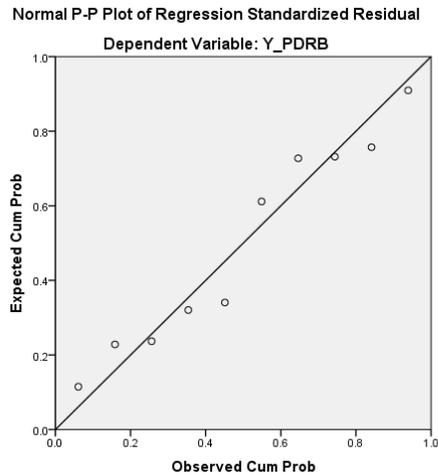
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

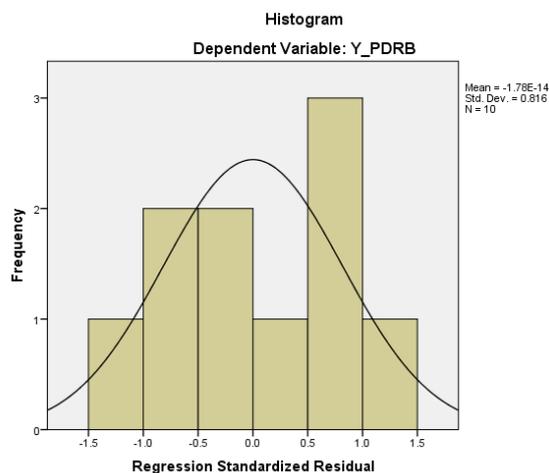
Berdasarkan pada Tabel 4.1 pada uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov signifikan pada $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa metode regresi pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. Grafik P-Plot yang dapat dilihat pada gambar berikut hasil uji normalitas yaitu sebagai berikut.

Gambar 4.5
Normal Probability Plot



Dari grafik di atas terlihat bahwa grafik normal *probability plot* terlihat titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya, garis ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Setelah melihat grafik P-Plot, selanjutnya dilakukan analisis terhadap grafik histogram. Adapun grafik histogram uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.6
Grafik Histogram



Grafik histogram diatas membentuk lonceng dan tidak condong ke kanan atau ke kiri sehingga grafik histogram tersebut dinyatakan normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dengan uji *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.2
Nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF)
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1_PAD	.185	5.398
X2_BM	.336	2.973
X3_BH	.385	2.597

a. Dependent Variable: Y_PDRB

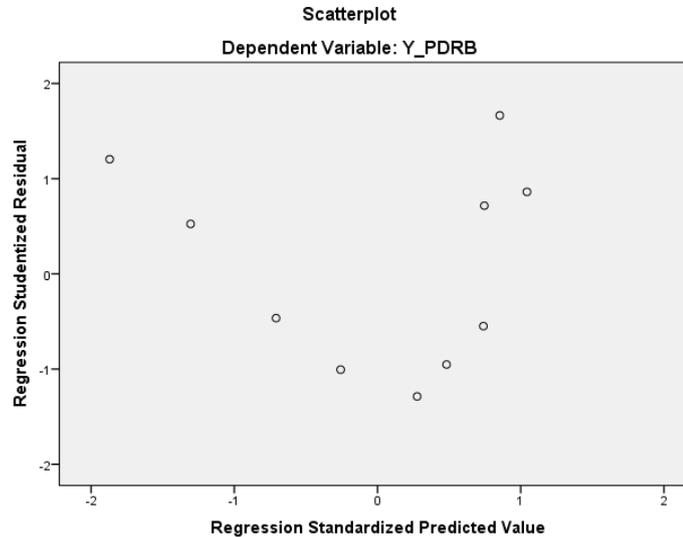
Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai *Tolerance* untuk variabel PAD sebesar $0,185 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $5,398 < 10$, sehingga variabel PAD dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.
2. Nilai *Tolerance* untuk variabel belanja modal sebesar $0,336 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $2,973 < 10$, sehingga variabel belanja modal dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.
3. Nilai *Tolerance* untuk variabel DBH migas sebesar $0,385 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $2,597 < 10$, sehingga variabel DBH migas dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji grafik. Uji grafik untuk pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatter plot* sebagai berikut.

Gambar 4.7
Uji Heteroskedastisitas



Bedasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar secara merata baik di atas sumbu X ataupun Y, serta titik berkumpul di suatu tempat dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, karena variabel independen tidak saling mempengaruhi.

4. Uji Autokorelasi

Dengan memperhatikan Uji Durbin-Watson maka hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.962 ^a	.925	.888	.03980	.583

a. Predictors: (Constant), X3_BHM, X2_BM, X1_PAD

b. Dependent Variable: Y_PDRB

Dari tabel di atas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 0,583. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan bahwa nilai DW antara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dengan model regresi ini.

4.1.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
Model		B	Std. Error	Beta	T	
1	(Constant)	14.318	1.682		8.511	.000
	X1_PAD	.271	.072	.978	3.778	.009
	X2_BM	-.048	.061	-.150	-.783	.464
	X3_BHM	-.028	.041	-.122	-.682	.521

a. Dependent Variable: Y_PDRB

Dari tabel di atas maka persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = 14,318 + 0,271X_1 - 0,048X_2 - 0,028X_3.$$

Persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 14,318 berarti apabila PAD, belanja modal dan DBH migas bernilai tetap maka PDRB sebesar 14,318.
2. Koefisien regresi variabel PAD menunjukkan pengaruh positif sebesar 0,271. Artinya, apabila PAD meningkat sebesar satu satuan maka PDRB akan meningkat akan meningkat sebesar 0,271 persen dengan asumsi variabel belanja modal dan DBH migas tidak berubah.

3. Koefisien regresi variabel belanja modal menunjukkan pengaruh negatif sebesar -0,048. Artinya, apabila belanja modal meningkat sebesar satu satuan maka PDRB akan menurun sebesar -0,048 persen dengan asumsi variabel PDRB dan DBH migas tidak berubah.
4. Koefisien regresi variabel DBH migas menunjukkan pengaruh negatif sebesar -0,028. Artinya, apabila DBH migas meningkat sebesar satu satuan maka PDRB akan menurun sebesar -0,028 persen dengan asumsi variabel PDRB dan belanja modal tidak berubah.

4.1.6 Hasil Uji t

Pembuktian hipotesis dengan uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.5
Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.318	1.682		8.511	.000
X1_PAD	.271	.072	.978	3.778	.009
X2_BM	-.048	.061	-.150	-.783	.464
X3_BHM	-.028	.041	-.122	-.682	.521

a. Dependent Variable: Y_PDRB

Dari Tabel 4.6 maka hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Hasil uji t menunjukkan bahwa variable pendapatan asli daerah yang diperoleh dari $t_{hitung} 3,778 > t_{tabel} 1,8945$, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ berarti signifikan serta variable PAD memiliki nilai koefisien sebesar 0,271. Yang berarti apabila PAD naik satu satuan maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,271. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variable PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di aceh. Dengan demikian, maka H_{01} di tolak dan H_{a1} diterima.

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Hasil uji t menunjukkan bahwa variable Belanja Modal yang diperoleh dari $t_{hitung} -0,783 < t_{tabel} 1,8945$, maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil signifikansi sebesar $0,464 > 0,05$ berarti tidak signifikan serta variable Belanja Modal memiliki nilai koefisien sebesar -0,048. Yang berarti apabila Belanja Modal naik satu satuan maka pertumbuhan ekonomi turun sebesar -0,048. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variable Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di aceh. Dengan demikian maka H_{02} diterima H_{a2} ditolak.

3. Pengaruh DBH Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Hasil uji t menunjukkan bahwa variable DBH Migas yang diperoleh dari $t_{hitung} -0,682 < t_{tabel} 1,8945$, maka dapat disimpulkan bahwa DBH Migas memiliki pengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil signifikansi

sebesar $0,521 > 0,05$ berarti tidak signifikan serta variable DBH Migas memiliki nilai koefisien sebesar $-0,028$. Yang berarti apabila DBH Migas naik satu satuan maka pertumbuhan ekonomi turun sebesar $-0,028$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variable DBH Migas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di aceh. Dengan demikian maka H_{03} diterima H_{a3} ditolak.

4.1.7 Hasil Uji F

Pembuktian hipotesis dengan uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.6
Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.118	3	.039	24.832	.001 ^b
	Residual	.010	6	.002		
	Total	.128	9			

a. Dependent Variable: Y_PDRB

b. Predictors: (Constant), X3_BHM, X2_BM, X1_PAD

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat nilai F_{hitung} sebesar 24,832 dengan hasil signifikan 0,001. Maka hasil ini dapat dibandingkan dengan nilai F_{tabel} sebesar 19,35 dengan menggunakan sig. 0,05. Sehingga hasil yang diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $24,832 > 19,35$ dengan nilai sig. $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa PAD, Belanja Modal dan DBH Migas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Dengan demikian maka hipotesis H_{a4} diterima.

4.1.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adapun hasil analisis koefisien determinasi yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.7
Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.962 ^a	.925	.888	.03980

a. Predictors: (Constant), X3_BHM, X2_BM, X1_PAD

b. Dependent Variable: Y_PDRB

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat nilai Adjusted R Square sebesar 0,888. Artinya, PAD, belanja modal da DBH migas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh sebesar 88,8%, sedangkan sisanya 11,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau daerah karena berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode

tertentu. Dari hasil penelitian diketahui bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh, dimana dari hasil uji t menunjukkan bahwa variable pendapatan asli daerah yang diperoleh dari t_{hitung} $3,778 > t_{tabel}$ $1,8945$, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ berarti signifikan.

Hal ini dikarenakan PAD merupakan gambaran keberhasilan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan di daerah-daerah tersebut terutama di provinsi aceh. hal ini dikarenakan bila PAD tinggi, pemerintah wilayah akan lebih mampu mengoptimalkan potensi PAD tersebut. Semakin meningkatnya PAD, maka akan semakin meningkat juga laju pertumbuhan ekonominya dikarenakan pajak dan retribusi daerah dikembalikan kepada masyarakat untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mawarni pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.2.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Adanya pembentukan modal membuat permintaan terhadap barang dan jasa menjadi efektif, menciptakan efisiensi produksi di masa depan dengan adanya kemajuan teknologi. Dengan adanya belanja modal maka daerah dapat meningkatkan aset serta pembangunan. Dari analisis data diketahui bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh, dimana

hasil uji t menunjukkan bahwa variable Belanja Modal yang diperoleh dari $t_{hitung} - 0,783 < t_{tabel} 1,8945$, maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil signifikansi sebesar $0,464 > 0,05$ berarti tidak signifikan.

Hal ini dikarenakan belanja modal yang dianggarkan dan dilaksanakan tidak dapat langsung memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana belanja modal butuh waktu dalam prosesnya, mulai dari anggaran, kemudian pelaksanaan baru setelah itu dapat digunakan atau dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Kemudian belanja modal untuk pembangunan tidak selalu langsung dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam perekonomian, seperti pembelian tanah untuk asset daerah, tidak langsung dibangun sarana dan prasarana sehingga harus menunggu untuk dibangun sarana dan prasaran baru setelah itu dapat digunakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Siti Dini, dkk yang menyatakan bahwa Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian sebelumnya yang tidak sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Surtika Yanti, dkk pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.2.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Dana bagi hasil migas merupakan bagi hasil pemerintah daerah dengan pusat dari hasil minyak dan gas bumi. Dari analisis data diketahui bahwa dana

bagi hasil migas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dimana dari hasil uji t menunjukkan bahwa variable DBH Migas yang diperoleh dari $t_{hitung} -0,682 < t_{tabel} 1,8945$, maka dapat disimpulkan bahwa DBH Migas memiliki pengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil signifikansi sebesar $0,521 > 0,05$ berarti tidak signifikan.

Pada umumnya DBH migas yang diberikan dari pemerintah bertujuan untuk menandai keperluan daerah, namun dari hasil yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil migas belum dialokasikan secara maksimal pada pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan juga disebabkan oleh menurunnya lifting migas lantaran tidak mempunyai sumur-sumur baru dan hanya menyisakan sumur-sumur lama untuk digali, sehingga sumur-sumur lama tersebut semakin digali semakin dalam yang mengakibatkan minyak tercampur air dan membutuhkan alat untuk memisahkan antara minyak dan air.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Muhammad Azizi tahun 2018 yang menyatakan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian sebelumnya yang tidak sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.2.4 Pengaruh PAD, Belanja Modal, dan Dana Bagi Hasil Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Dari analisis data diketahui bahwa PAD, belanja modal dan dana bagi

hasil migas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Hal ini diketahui dari uji F, dimana diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $24,832 > 19,35$ dengan nilai sig. $0,001 < 0,05$. Dengan meningkatnya PAD maka pembangunan akan berjalan efektif. Begitu pula dengan nilai belanja modal yang terus meningkat maka pemerintah dapat menggunakannya untuk meningkatkan aset dalam pembangunan. Selain itu adanya dana bagi hasil yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan di Aceh.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan asli modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dimana nilai $t_{hitung} 3,778 > t_{tabel} 1,8945$ dan $t \alpha$ sebesar $0,009 < 0,05$.
2. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dimana nilai $t_{hitung} -0,783 < t_{tabel} 1,8945$ dan $t \alpha$ sebesar $0,464 > 0,05$.
3. Dana bagi hasil migas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dimana nilai $t_{hitung} -0,682 < t_{tabel} 1,8945$ dan $t \alpha$ sebesar $0,521 > 0,05$.
4. Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Bagi Hasil Migas secara Simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dimana Nilai $F_{hitung} 24,832 > 19,35$ dan $F \alpha$ sebesar $0,001 < 0,05$.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu :

1. Pemerintah aceh harus terus meningkatkan PAD dengan cara menggali sektor-sektor ekonomi baru agar pembiayaan pembangunan di provinsi

aceh meningkat.

2. Belanja modal sebaiknya difokuskan terhadap pembangunan infrastruktur agar kegiatan perekonomian disektor-sektor dapat berjalan dengan efektif.
3. Diharapkan kepada Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA) untuk dapat lebih mengoptimalkan dan meningkatkan produksi terhadap lapangan-lapangan minyak dan gas bumi yang tengah beroperasi di provinsi aceh untuk dapat memproduksi migas lebih banyak. Dan diharapkan juga untuk BPMA agar melihat peluang lokasi lapangan migas lainnya yang memungkinkan untuk dijadikan lapangan migas yang baru, sehingga dapat meningkatkan penerimaan dana DBH dan TDBH dari sektor migas dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 10 Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: CV, Budi Utama, 2018)
- Abel Rinaldi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Ahmas Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ajuar, *Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia*, *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan*, Vol.20, no.2 agustus 2016.
- Amir Amri, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
- Amir Amri, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008).
- Anasmen. (2009). “Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat 2000-2006. Tesis S-2, Fakultas ekonomi Program studi perencanaan dan kebijakan publik kekhususan ekonomi keuangan negara dan daerah Depok.(tidak dipublikasi). Erlina, & Rasdianto. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Actual*. Medan.
- Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012)
- Arsyad Loncolin, *Ekonomi Pembangunan Edisi keempat*, (Yogyakarta: STIE, YKPN, 1999)
- Arsyad Loncolin, *Ekonomi Pembangunan*, (STIE, YKPN, Yogyakarta, 2011)
- BPS Kota Langsa, 2021, diakses pada tanggal 13 Januari 2022
- Budiarso, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: BPFE, 2015)
- Dedi Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006)

Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008.

Fajri, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Sumatera. *E-Journal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29–35.

Gregory N Mankiw, *Makroekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2007)

Hakim, L. & Wijayanti, A. (2014). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(1).

Halim, Abdul, (2004). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Jakarta; Salemba Empat. Hal. 42 Erlina, & Rasdianto. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Actual*. Medan.

<https://aceh.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 21 November 2021

<https://aceh.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 31 Desember 2021

<https://acehprov.go.id> , diakses pada tanggal 07 Juli 2022

Husna, C. A. (2013). Kontribusi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara Kaitannya Dengan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 169-196. Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2015).

Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015)

Joko Untoro, *Ekonomi makro*, (Jakarta : Kawah Media,2010)

Kuncoro, Mudrajat (2004). Otonomi Dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.

Listiotini, “*Fenomen Flaypaper Effect Pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten / kota di Sumatera Utara*”, *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol.4 No, 2012

Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2006)

Michel Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga* (Jakarta : Erlangga, 2000)

Michel Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*, (Jakarta, Erlangga, 2000), h.44 Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kecana, 2016)

Ni Wayan Nuryanti Dewi, dkk, “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Langsung di Provinsi Bali*”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 4, No. 11 November 2015

Pasal 181 ayat 1 huruf b angka 5 dan 6 undang-undang nomor 11 tahun 2006

Pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019

Rahman AR, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol 1, No 1, 2016

Romhadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Matematika Integratif*, 14(2), 113-120.

Romhadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Matematika Integratif*, 14(2), 113-120.

Romi Daniel Tuwo, Debby Christina Rotinsulu, George M.V Kawung, “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*” , *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol 21, No.04 Oktober 2021

Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2011)

Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 143 Abrar. Muhammad .(2010). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

Siti Mundiroh , “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah*”, *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, Vol 2 , No 1,2019

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016)

Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Sukirno Sadono, *Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2012)

Surtika Yanti, Pengaruh Belanja Modal, Investasi PMDN Dan Investasi PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB, *Jurnal Ekonobis*, Vol 7, No 1, 2021

Susanti, H., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Aceh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Setelah Tsunami. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4(1), 1-12.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Yunita Kumala Sari, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015

Lampiran 1. Data Penelitian

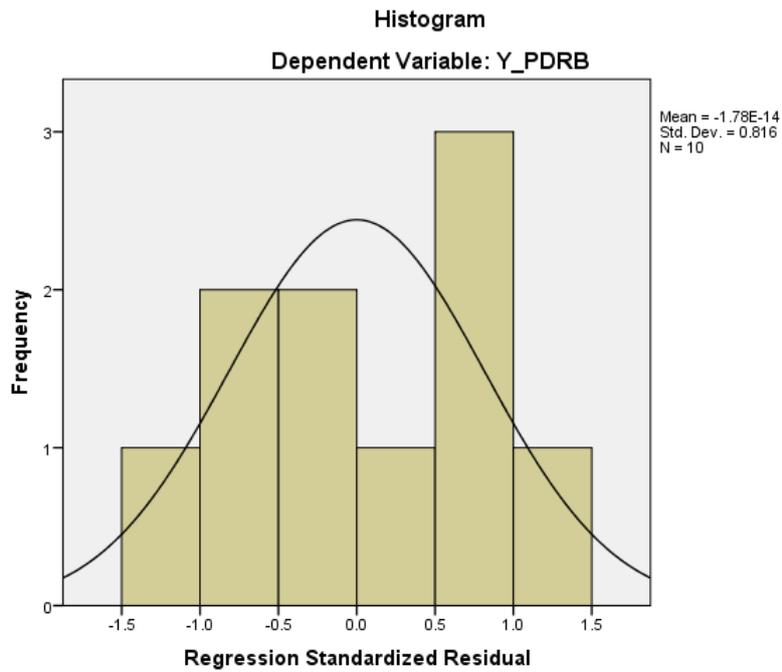
Tahun	PAD (Ribu Rupiah)	Belanja Modal (Ribu Rupiah)	DBH Migas (Ribu Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)
2011	802.840.173	1.473.983.448	1.044.164.516	89.844.697
2012	901.720.376	815.338.776	878.780.195	94.290.896
2013	1.325.435.091	1.650.120.551	955.082.833	98.205.891
2014	1.731.130.839	2.407.479.412	1.051.034.591	102.157.046
2015	1.972.049.032	2.025.103.488	561.242.791	106.527.357
2016	2.060.180.945	2.284.582.301	300.551.470	111.067.047
2017	2.276.305.568	2.168.299.049	301.860.068	115.658.418
2018	2.359.385.393	2.503.941.129	325.183.180	120.848.599
2019	2.698.912.471	3.162.088.165	515.873.236	125.906.294
2020	2.570.775.877	1.755.472.079	406.053.141	124.975.810

Lampiran 2. Hasil Transformasi Ln

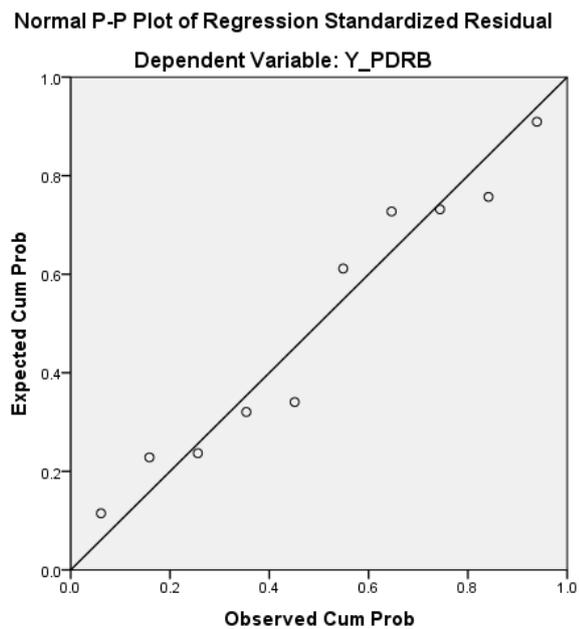
Tahun	Ln PAD	Ln Belanja Modal	Ln DBH Migas	Ln PDRB
2011	20.5	21.11	20.77	18.31
2012	20.62	20.52	20.59	18.36
2013	21.01	21.22	20.68	18.4
2014	21.27	21.6	20.77	18.44
2015	21.4	21.43	20.15	18.48
2016	21.45	21.55	19.52	18.53
2017	21.55	21.5	19.53	18.57
2018	21.58	21.64	19.6	18.61
2019	21.72	21.87	20.06	18.65
2020	21.67	21.29	19.82	18.64

Lampiran 3. Hasil Uji Normalitas

1. Uji Histogram



2. Uji Normal P-Plot



3. Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03249809
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.193
	Positive	.193
	Negative	-.171
Test Statistic		.193
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1_PAD	.185	5.398
X2_BM	.336	2.973
X3_BH	.385	2.597
M		

a. Dependent Variable: Y_PDRB

Lampiran 5. Hasil Uji Autokorelasi

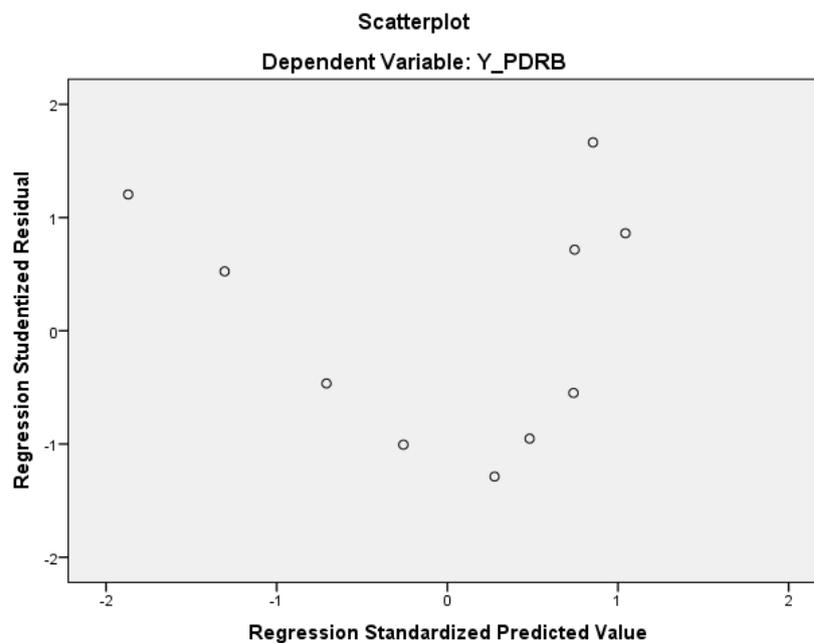
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.962 ^a	.925	.888	.03980	.583

a. Predictors: (Constant), X3_BHM, X2_BM, X1_PAD

b. Dependent Variable: Y_PDRB

Lampiran 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 7. Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.318	1.682		8.511	.000
	X1_PAD	.271	.072	.978	3.778	.009
	X2_BM	-.048	.061	-.150	-.783	.464
	X3_BHM	-.028	.041	-.122	-.682	.521

a. Dependent Variable: Y_PDRB

Lampiran 8. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.118	3	.039	24.832	.001 ^b
	Residual	.010	6	.002		
	Total	.128	9			

a. Dependent Variable: Y_PDRB

b. Predictors: (Constant), X3_BHM, X2_BM, X1_PAD

Lampiran 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.962 ^a	.925	.888	.03980

a. Predictors: (Constant), X3_BHM, X2_BM, X1_PAD

b. Dependent Variable: Y_PDRB

Lampiran 10. Hasil Regression

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.318	1.682		8.511	.000
	X1_PAD	.271	.072	.978	3.778	.009
	X2_BM	-.048	.061	-.150	-.783	.464
	X3_BHM	-.028	.041	-.122	-.682	.521

a. Dependent Variable: Y_PDRB

BIODATA



1. Data Pribadi

Nama : FATMAWATI

Tempat & Tanggal Lahir : Bandar Baru, 07 Agustus 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Dusun. Banta Ahmad, Desa. Bandar Baru,
Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang.

Telepon & Hp : +62 82277074321

Email :

2. Orang Tua

Ayah kandung : Arsyad

Ibu kandung : Yusmidar

Alamat Asal : Dusun. Banta Ahmad, Desa. Bandar Baru,
Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang.

3. Riwayat Pendidikan Formal

- a. TKA Terpadu Yayasan Pendidikan Dewi
- b. SD Negeri Sungai iyu
- c. SMP Swasta Darul Mukhlisin
- d. MA Yaspendi Sungai iyu
- e. Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam 2018-2023.



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 364 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
-FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing skripsi;
- b. bahwa personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 376 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
- Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 11 Februari 2022;
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
- kesatu : Menetapkan **Dr. Basri, MA** sebagai Pembimbing I dan **Zikriatul Ulya, SE., M.Si** sebagai Pembimbing II untuk penulisan skripsi mahasiswa atas nama **Fatma Wati NIM 4012018036** dengan judul skripsi "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Bagi Hasil Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh**";
- kedua : Masa pembimbingan dilakukan maksimal selama enam bulan, dengan ketentuan :
1. setiap bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
2. perubahan judul skripsi tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;
3. selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada IAIN Langsa;
- ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 09 Agustus 2022 M
11 Muharram 1444 H

DEKAN,



Penyusunan :
Ketua Jurusan/Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa;
Pembimbing I dan II;
Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon 0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139;
Website: www.febi.iainlangsa.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B/722/In.24/LAB/PP.00.9.08/2022

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : Fatmawati

NIM : 4012018036

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
BELANJA MODAL DAN BAGI HASIL MIGAS
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ACEH

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.

Langsa, 05 Agustus 2022
Kepala Laboratorium FEBI


Mastura, M.E.I

NIDN. 2013078701